

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banjir merupakan fenomena yang terjadi secara berkala dan mempengaruhi hampir semua negara pada setiap tahunnya, termasuk Indonesia (Setiawan et al., 2022). Fenomena banjir dipengaruhi oleh perubahan iklim yang saat ini memberikan dampak signifikan terhadap dinamika cuaca. Perubahan curah hujan, pola cuaca, serta frekuensi dan tingkat keparahan peristiwa cuaca ekstrem merupakan dampak nyata dari perubahan iklim. Selain itu kehadiran permukiman kumuh di sepanjang tepi sungai, perubahan penggunaan lahan, pembuangan sampah yang sembarangan, dan perencanaan yang buruk untuk sistem pengendalian banjir merupakan faktor dari aktivitas manusia (Setiawan et al., 2020).

Faktor terjadinya banjir salah satunya disebabkan oleh aktivitas manusia dan perencanaan pengendalian infrastruktur yang buruk juga dapat mengakibatkan banjir selain dari faktor alami yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Menurut World Risk Report tahun 2025, Indonesia berada di posisi risiko bencana tertinggi ke-3 dunia (Zahra, 2025). Banjir menjadi fokus utama dari data tersebut karena menyumbang 44% dalam bencana global. Data tersebut menunjukkan bahwa banjir bukan hanya persoalan musiman, tetapi telah menjadi isu risiko kebencanaan yang signifikan, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang terintegrasi, mulai dari perbaikan infrastruktur, penguatan kebijakan pengelolaan

lingkungan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga fungsi saluran dan sungai (BNPB, 2025).



Gambar 1. 1 Infografis Kejadian Bencana Tahun 2024

Sumber : Laporan Bencana Indonesia Tahun 2024

Menurut data yang dikumpulkan oleh pusat data, informasi, dan komunikasi kebencanaan BNPB terjadi 3.472 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024. Bencana hidrometeorologi, baik yang bersifat basah maupun kering mendominasi sebagian besar dari 3.472 kejadian bencana pada tahun 2024. Banjir menjadi peristiwa bencana paling banyak dengan 1.420 kejadian. Kebakaran hutan dan lahan menempati urutan kedua dengan 973 kejadian, cuaca ekstrem dengan 733 kejadian, dan longsor dengan 207 kejadian.

Permasalahan banjir tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sungai sebagai bagian utama dari sistem pengelolaan sumber daya air. Sungai adalah suatu wadah untuk menampung air yang terbentuk secara alami berfungsi sebagai pengaliran dari hulu ke hilir hingga muara sungai (Asrori, 2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menjelaskan

bahwa sungai merupakan sumber daya alam yang diatur dan dikuasi oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek diantaranya perencanaan sungai, pelaksanaan pengelolaan, pemantauan, serta pengendalian terhadap daya rusak air seperti banjir (Zakiyah & Kurniawan, 2024).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Upaya pengelolaan sungai dan pengendalian banjir secara yuridis, komitmen negara dalam menjaga kualitas lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh degradasi sumber daya air dan meningkatnya risiko bencana banjir.

Sejalan dengan amanat tersebut, revitalisasi menjadi salah satu upaya strategis dalam rangka mengembalikan fungsi suatu tempat. Revitalisasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai suatu kawasan atau lahan melalui pengembangan ulang, hal ini dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (Ratih et al., 2021). Revitalisasi sungai merupakan rangkaian upaya terintegrasi untuk menghidupkan kembali fungsi dan kondisi sungai yang mengalami degradasi. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi ekologis, fisik, dan sosialnya agar mendukung ketahanan lingkungan, pengendalian banjir, serta pelayanan

terhadap kebutuhan masyarakat sekitar (Bintang et al., 2020). Revitalisasi sungai juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan khususnya pada di sekitar sungai agar masyarakat enggan membuang sampah di sungai.

Dari data base BNPB tahun 2024 Provinsi Jawa Timur berada diposisi kedua dengan jumlah sebanyak 434 kejadian bencana pada tahun 2024, salah satu bencana yang sering terjadi adalah banjir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air pada setiap Kabupaten/Kota meluncurkan beberapa program sebagai upaya untuk mengatasi masalah banjir. Menurut kajian risiko bencana nasional Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sampai 2026 Kabupaten Sidoarjo masuk ke dalam kategori luas bahaya banjir pada kelas tinggi.

Tabel 1. 1 Daftar Risiko Bencana Banjir di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Bahaya Luas (Ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Kelas
1	Lamongan	1.412	39.360	52.884	Tinggi
2	Bojonegoro	1.586	41.455	39.689	Tinggi
3	Sidoarjo	751	24.228	37.300	Tinggi
4	Gresik	1.079	28.085	37.171	Tinggi
5	Tuban	431	25.501	26.632	Tinggi
6	Jombang	1.533	27.876	25.305	Tinggi
7	Nganjuk	1.571	29.640	24.346	Tinggi
8	Banyuwangi	1.104	55.583	21.254	Tinggi
9	Tulungagung	944	17.815	18.159	Tinggi
10	Sumenep	674	22.155	18.078	Tinggi

Sumber : Laporan Bencana Indonesia Tahun 2024 (data diolah penulis)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana banjir diantaranya Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Sidoarjo diidentifikasi dalam kajian ini sebagai salah satu dari 10 Kabupaten di Jawa Timur yang masuk pada kategori tinggi ketiga dengan luas sebesar 37.300 Ha. Kabupaten Sidoarjo berada diposisi strategis sebagai wilayah penyangga kawasan metropolitan Surabaya serta mengalami perkembangan wilayah yang cukup pesat. Selain itu, secara geografis Kabupaten Sidoarjo termasuk wilayah dataran rendah yang berada di kawasan hilir beberapa aliran sungai sehingga memiliki kerentanan terhadap berbagai permasalahan lingkungan seperti genangan dan banjir (Mukhtar, 2024).

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan revitalisasi sungai guna menjaga lingkungan yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Dalam Perda ini, sungai, saluran drainase, dan kawasan resapan air diposisikan sebagai bagian dari jaringan prasarana wilayah yang harus dijaga fungsi dan keberlanjutannya. Selain itu, pengaturan kawasan lindung, termasuk sempadan sungai dan ruang terbuka hijau, ditujukan untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat mengurangi daya tampung air dan meningkatkan risiko banjir. Kabupaten Sidoarjo sendiri merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur yang berada pada kawasan delta dan pesisir, serta diapit oleh sejumlah sungai besar yang memiliki peranan penting

dalam sistem hidrologi regional. Secara geografis, Sidoarjo dihimpit oleh dua sungai besar pecahan dari Sungai Brantas yaitu Kali Mas di bagian barat dan Kali Porong dibagian timur.



Gambar 1. 2 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo

Sumber : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Gambar di atas menunjukkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo memasukkan kegiatan revitalisasi sungai kedalam daftar program prioritas ke 17 yaitu perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), revitalisasi sungai, renovasi manajemen sampah. Kegiatan tersebut tentunya penting dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya resiko bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan banjir telah melakukan berbagai upaya seperti pengangkatan sedimen, lumpur, dan sampah yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air dari tahun ke tahun (Astuti, 2022). Namun, setelah Dinas PU Binas Marga dan Sumber Daya Air melakukan kegiatan pengerukan atau pengangkatan sedimen yang dilakukan

kurang berjalan optimal tanpa melibatkan masyarakat secara langsung untuk melakukan normalisasi fungsi kali. Menurut Bapak Dani Eko Guntoro, ST., MT selaku staff Bidang Ketahanan Drainase mengatakan:

“dari dulu kegiatan pengerukan sedimen sudah dilakukan satu kali dalam satu tahun mas, tapi setelah dilakukan pengerukan sampah kembali menumpuk khususnya di area sungai.” (Hasil wawancara pendahuluan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2025).

Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Program Sidoresik sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan yang setiap tahun dilakukan oleh Dinas PU, dimana program sebelumnya dilakukakn tanpa melibatkan masyarakat sebagai penggerak atau aktor utamanya. Program Sidoresik merupakan terobosan baru Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kebersihan dan revitalisasi sungai melalui partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Program Sidoresik berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Peluncuran Program Sidoresik ini pertama kali pada tahun 2021 yang tujuannya untuk merevitalisasi sungai agar bersih, bebas dari sampah, dan sekaligus mengedukasi masyarakat untuk selalu merawat dan menjaga lingkungannya dengan tidak membuang sampah di sungai (Perdana, 2021). Program Sidoresik ini mencakup sejumlah kegiatan termasuk pembersihan sampah pada sungai, pemulihan aliran air, penghijauan tepi sungai, pembelajaran kepada masyarakat tentang nilai pelestarian lingkungan, dan pengembangan pariwisata berbasis sungai yang menjadi daya tarik masyarakat (Suminar, 2022). Mekanisme dari Program Sidoresik yaitu dengan kolaborasi dengan lima elemen penting (pentahelix) yaitu pemerintah,

masyarakat, swasta, akademisi, dan media. Ning Sasha selaku penggagas Program Sidoresik Kabupaten Sidoarjo mengatakan:

“Sido Resik adalah program kebanggaan warga Sidoarjo, sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi pentahelix (lima elemen penting) antara pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media bisa berjalan baik di Kota Delta.”

(Sumber: <https://sidoarjo.times.co.id/news/berita/c6f34qcykr/Ning-Sasha-Apresiasi-SIDO-RESIK-Masuk-Nominasi-Kabupaten-Terinovatif-IGA-2024>, diakses 26 Desember 2025)

Sistem dari program ini yaitu sebuah kompetisi antar desa di Kabupaten Sidoarjo, dan desa yang berhasil membersihkan dan mempercantik sungainya akan dinyatakan sebagai pemenang. Tujuan utama dari Program Sidoresik adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan untuk mengurangi risiko bencana banjir khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat memiliki peran penting untuk keberhasilan Program Sidoresik ini. Ning Sasha selaku penggagas Program Sidoresik Kabupaten Sidoarjo menegaskan:

“Tentu Partisipasi aktif dari tiap elemen masyarakat menjadi tolak ukur bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berhasil menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam pembangunan berkelanjutan yang ada di daerah tersebut”

(Sumber: <https://sidoarjo.times.co.id/news/berita/c6f34qcykr/Ning-Sasha-Apresiasi-SIDO-RESIK-Masuk-Nominasi-Kabupaten-Terinovatif-IGA-2024>, diakses 26 Desember 2025)

Penilaian kompetisi sidoresik dilihat dari empat aspek yang menjadi acuan untuk menentukan pemenang. Wahib Achmadi selaku ketua juri teknis sidoresik mengatakan:

“Ada empat aspek dalam penilaian sidoresik 2023, satu aspek kelembagaan, dua obyek fisik saluran air, tiga kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta yang keempat aspek sosial ekonominya”

(Sumber: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/476443/jelang-penjurian-akhir-10-nominasi-sido-resik-2023-harus-penuhi-4-aspek-ini> diakses 26 Desember 2025)

Aspek kelembagaan menilai sejauh mana peran, koordinasi, dan kapasitas institusi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Sidoresik seperti masyarakat, pemerintah desa dan aktor lain guna menciptakan keberlanjutan program. Aspek obyek fisik saluran air berkaitan dengan kondisi fisik yang direvitalisasi, seperti kebersihan sungai, kelancaran aliran air dan memastikan sungai dapat berfungsi optimal. Aspek kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dinilai dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai melalui kerja bakti dan kepedulian terhadap keberlanjutan hasil revitalisasi. Dan aspek sosial ekonomi dilihat dari potensi pemanfaatan sungai sebagai ruang publik untuk penunjang aktivitas ekonomi lokal dan pengembangan UMKM sekitar.

Program Sidoresik telah dilakukan 2 fase pertama pada tahun 2021 dengan juara pertama Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu, juara kedua Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin, dan juara ketiga Desa Porong Kecamatan Porong. Program Sidoresik yang kedua dilaksanakan pada tahun 2023 dengan juara pertama Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon, juara kedua Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin, juara ketiga Desa Kemantren Kecamatan Tulangan, juara harapan satu Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo, juara harapan dua Desa Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin, dan juara harapan tiga Desa Sumorame Kecamatan Candi (Ahaddiini, 2023). Peserta lomba Program Sidoresik dihadirkan perwakilan setiap kecamatan mengirimkan minimal dua desa

untuk berpartisipasi dan desa yang pernah menjadi juara pada tahun 2021 maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti kembali pada tahun 2023.

Pada fase kedua program Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali yang dikenal sebagai Sidoresik, Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon berhasil mengungguli sembilan desa lainnya dan keluar sebagai juara pertama. Bupati Sidoarjo secara langsung mengumumkan pemenang Program Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemerintah Desa Serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program sidoresik secara bersinergi dalam pelaksanaan program sidoresik. Hal tersebut sesuai dengan hasil pra wawancara bersama Bapak Dani Eko Guntoro, ST., MT selaku staff Bidang Ketahanan Drainase, Pak Dani mengungkapkan:

“Saya sarankan untuk penelitian ini mengambil lokasi yang di Desa Kedungcangkring mas, karena Desa Kedungcangkring selain menjadi juara pertama pada Lomba Sidoresik pada tahun 2023, juga sebagai percontohan untuk ajang Innovation Government Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024, kemudian hasilnya juga tentu bagus, mas bisa lihat langsung di Kanal Mobil disana.” (Hasil wawancara pendahuluan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2025).

Desa Kedungcangkring merupakan desa yang berkembang sebagai wilayah agraris, kehidupan sosial dan ekonominya bergantung pada keberadaan sumber daya air. Salah satu yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama “Kanal Mobil”. Kanal Mobil merupakan saluran air yang menjadi bagian dari sistem irigasi di wilayah Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon yang ada sejak tahun 1920 (Mulya, 2023b). Seiring berjalannya waktu menurunnya perhatian terhadap pengelolaan sungai menyebabkan kanal mengalami degradasi. Kanal

yang seharusnya berperan sebagai saluran air menjadi kehilangan fungsinya, bahkan berpotensi menjadi kawasan kumuh dan tercemar. Upaya revitalisasi mulai mendapat perhatian serius ketika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan Program Sidoresik tersebut. Dalam konteks ini, Desa Kedungcangkring menjadi salah satu desa yang berhasil memanfaatkan program tersebut secara optimal melalui pengembangan “Kanal Mobil”. Melalui program ini juga “Kanal Mobil” yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai saluran air direvitalisasi menjadi destinasi wisata desa berbasis sungai (Setiawan, 2023).

Innovation Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo mengajukan 124 inovasi dan 2 diantaranya masuk dalam nominasi inovasi digital dan non digital. Aplikasi Kopi Pahit (Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi Stunting) menjadi representasi dari inovasi digital dan Program Sidoresik (Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali) menjadi representasi dari inovasi non digital, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengajukan “Kanal Mobil” Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon yang menjadi pemenang juara pertama lomba sidoresik pada tahun 2023 dan Dermaga Sungai Ciorame di Desa Sumorame Kecamatan Candi (Diskominfo, 2024). Inovasi ini sebagai revolusioner dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan khususnya fungsi kali. Kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif dalam ajang *Innovation Government Award* (IGA) melalui Program Sidoresik dan Aplikasi Kopi Pahit. (Kominfo, 2024). Berdasarkan pencapaian dan prestasi Desa

Kedungcangkring Kecamatan Jabon peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokus penelitian.

Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon merupakan desa yang berhasil meraih juara pertama pada Program Sidoresik pada tahun 2023 dan menjadi representasi untuk Kabupaten Sidoarjo di ajang *Innovation Government Award* tahun 2024 dan menjadi Kabupaten Terinovatif melalui program tersebut. Desa ini dinilai berhasil melakukan revitalisasi sungai dan menjadi percontohan untuk desa-desa lainnya. Namun demikian, keberhasilan program secara administratif dan kompetitif perlu diimbangi dengan kajian akademik yang menilai sejauh mana dampak program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui evaluasi dampak dari Program Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali (Sidoresik).

Adapun penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan Basuki (2024) dengan judul Strategi Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yang membahas tentang Program Sidoresik di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun memiliki kesamaan fokus pada Program Sidoresik, penelitian tersebut menekankan pada strategi pelayanan publik dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat serta perluasan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan pengaduan.

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Basuki menggunakan teori strategi pelayanan publik menurut Jack Kooten, yang mencakup strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi

kelembagaan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sidoresik dan layanan pengaduan seperti *Call Center* 112 dan *WhatsApp* 24 jam telah berjalan cukup baik dan berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat. Strategi organisasi dan strategi program dinilai efektif dalam meningkatkan responsivitas pelayanan, sementara strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta batas kewenangan antar instansi.

Dari banyaknya penelitian yang membahas tentang Program Sidoresik belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas terkait evaluasi dampak yang dihasilkan dari program tersebut, tentu menjadi alasan peneliti tertarik untuk membahas Program Sidoresik menggunakan teori evaluasi dampak. Peneliti ingin melihat sejauh mana dampak yang dihasilkan dari adanya Program Sidoresik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Dengan adanya kajian terkait evaluasi dampak dalam konteks ini pada Program Sidoresik maka akan memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo apakah program tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Pada penelitian ini menggunakan teori menurut Finsterbusch dan Motz dalam Samodra Wibawa (1994) dalam konteks evaluasi dampak terdapat 4 unit yang terkena dampak (pedampak) diantaranya: 1) dampak individu; 2) dampak organisasional; 3) dampak masyarakat; 4) dampak lembaga dan sistem sosial. Sejalan dengan pengelompokan unit evaluasi dampak tersebut, Finsterbusch dan

Motz dalam Samodra Wibawa (1994) juga mengemukakan ada empat jenis evaluasi dampak program yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian, yaitu: *Single Programme After Only*, *Single Programme Before After*, *Comparative After Only*, *Comparative Before After*.

Dari uraian latar belakang di atas Program Sidoresik yang telah sukses membawa nama Kabupaten Sidoarjo menjadi Kabupaten terinovatif pada tahun 2024 membuktikan bahwa program ini berhasil menciptakan terobosan baru untuk mengatasi masalah banjir khususnya pada Desa Kedungcangkring yang sebagai representasi dari Program Sidoresik. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perubahan dampak yang diakibatkan oleh Program Sidoresik dengan melihat ke-empat aspek dampak kebijakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas bisa ditarik sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana Evaluasi Dampak Sebelum dan Sesudah Adanya Program Sidoresik di Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan dampak dari adanya program revitalisasi sungai melalui Program Sidoresik di Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian di atas hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan evaluasi dampak. Manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan evaluasi dampak menurut Finsterbusch dan Motz dalam revitalisasi sungai melalui Program Sidoresik.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan teori evaluasi dampak untuk menilai efektivitas kebijakan publik, khususnya program lingkungan berbasis revitalisasi sungai. Penulis memperoleh pengalaman empiris dalam menganalisis perubahan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan Program Sidoresik khususnya pada Desa kedungcangkring Kabupaten Sidoarjo.
2. Bagi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam mengetahui dampak pelaksanaan Program Sidoresik terhadap pengurangan risiko banjir menggunakan pendekatan evaluasi dampak, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan perbaikan, penguatan, serta keberlanjutan program.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam kegiatan diskusi akademik serta sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki bidang studi relevan dengan kajian Administrasi Publik, khususnya terkait evaluasi dampak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah pada perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik.